

BAB III

PEMINDAHAN KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT UNTUK ISRAEL KE YERUSALEM

Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel telah berlangsung pada tanggal 14 Mei 2018. Kedutaan tersebut yang sebelumnya terletak di Tel Aviv kini resmi dipindahkan ke Yerusalem. Kebijakan tersebut akhirnya terlaksana pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump. Awalnya kebijakan ini sudah lama dicanangkan sejak tahun 1990-an pada masa kepemimpinan Presiden Bill Clinton. Hingga akhirnya Kongres menerbitkan undang-undang Kedutaan Yerusalem (*Jerusalem Embassy Act*) pada tahun 1995 yang isinya memerintahkan pemerintahan Amerika Serikat untuk memindahkan kantor Kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem sebelum tahun 1999. Namun pemindahan tersebut tertunda dari masa ke masa. Pemindahan kedutaan tersebut sebagai salah satu bentuk AS dalam mengakui kedaulatan Negara Israel. Hal ini sudah berlansung sejak 14 Mei 1948 kala pemerintahan Presiden Harry Truman yang mengumumkan jika pendirian negara Yahudi mengundang ikanatan mendalam antara AS dengan orang-orang Yahudi. AS mengakui Israel sebagai negara merdeka di hari yang sama, dan menjadikannya sebagai Negara pertama yang melakukannya. Ikatan itu terus berjalan hingga 70 tahun setelahnya, Israel menjadi mitra AS yang paling dapat diandalkan di Timur Tengah, terikat oleh ikatan sejarah dan budaya, serta oleh kkepentingan bersama.

Proyek ini lambat terwujud karena membutuhkan waktu terkait logistik dan pejabat administrasi, termasuk mengamankan lokasi untuk perumahan diplomat (Yasinta,

2018). Pada prosesnya, Kedutaan sementara memiliki kantor duta besar serta staf kecil dan, pada akhir 2019, paviliun kedutaan baru di kompleks Arnona akan dibuka. Konsulat di Yerusalem Timur akan tetap memberikan layanan bagi masyarakat Palestina. Duta Besar AS, David Friedman mengatakan akan tetap tinggal di kediaman di Herzliya di sebelah utara Tel Aviv, dan menempuh perjalanan menuju lokasi kedutaan baru demi alasan keamanan. Pembukaan kedutaan berlangsung lebih cepat dibandingkan perkiraan sebelumnya. Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence juga mengatakan di parlemen Israel bahwa pemindahan kedutaan akan berlangsung pada akhir 2019 (CNN Indonesia, 2018).

Departemen Luar Negeri telah menetapkan rencana yang lebih sederhana untuk mengubah bangunan konsuler yang ada di Arnona yang terletak di Yerusalem Barat. Itu akan mengurangi biaya proyek dan memungkinkan Duta Besar David M Friedman dan stafnya pindah ke sana pada awal tahun 2019. Gedung Arnona berada di dekat Green Line, yang berfungsi sebagai perbatasan de facto negara Israel dari 1949 sampai Perang Arab-Israel pada 1967. Sementara bangunan tersebut, yang sekarang berfungsi mengeluarkan visa dan menawarkan layanan konsuler kepada warga Amerika, akan dibutuhkan di duta besar untuk melakukan operasi rahasia. Ini adalah struktur yang cukup baru dengan keamanan fisik yang lebih baik daripada kedutaan di Tel Aviv (Marniati, 2018).

A. Faktor Yang Memengaruhi Rencana Pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem

1. *Jerusalem Embassy Act 1995*

Pada tahun 1995, Kongres mengadopsi *Jerusalem Embassy Act* atau Undang-Undang Kedutaan Yerusalem, untuk mendesak pemerintah federal untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota dari negara Israel dan memindahkan Kedutaan Amerika Serikat. Undang-undang tersebut juga menegaskan kembali hak-hak setiap negara yang

berdaulat untuk menunjuk ibu kotanya sendiri (Share America, 2017). Pernyataan yang disampaikan dalam undang-undang ini adalah Yerusalem harus tetap menjadi kota yang tidak terbagi, dan hak-hak dari setiap kelompok etnis dan agama dilindungi. Status Kota Yerusalem harus diakui sebagai ibukota dari Negara Israel dan Kedutaan Besar AS di Israel harus didirikan di Israel selambat-lambatnya 31 Mei 1999. Undang-undang tersebut juga menjelaskan jika Pemerintah AS juga memberikan dana tidak lebih dari 50% yang dialokasikan ke Departemen Luar Negeri untuk tahun fiskal 1999 untuk “Akuisisi dan Pemeliharaan Bangunan di Luar Negeri” (*Acquisition and Maintenance of Buildings Abroad*) dapat dibwajibkan sampai Sekretaris Negara menentukan dan melaporkan kepada Kongres bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel resmi dibuka. Dana yang disahkan pada tahun fiskal 1996 adalah tidak kurang dari \$ 25.000.000 untuk konstruksi dan biaya lain yang terkait dengan pendirian Kedutaan Besar AS di Yerusalem. Sedangkan untuk tagun fiskal 1997 disediakan dana sebesar \$ 75.000.000.

Undang-undang ini menjelaskan tentang jika AS menjelaskan jika sejak tahun 1950, kota Yerusalem telah diakui sebagai ibukota dari negara Israel. Dalam Kota Yerusalem terdapat Presiden Israel, Parlemen, dan Mahkamah Agung, dan beberapa situs dari banyak Kementerian Pertahanan Pemerintah, dan lembaga sosial budaya. Kota Yerusalem berperan sebagai pusat spiritual dari agama Yahudi, juga sebagai kota suci dari kepercayaan-kepercayaan lain. Kota Yerusalem pada tahun 1948-1967 adalah kota yang terbagi dan enduduk Israel dari segala agama dan juga waga yahudi di seluruh negara dilarang mengaskes situs yang kudus di daerah yang dikuasai oleh Jordan. Pada 1967, Kota Yerusalem dipertemukan kembali selama konflik yang dikenal sebagai *Six Day War*. Sejak itu, Yerusalem berperan sebagai kota perserikatan yang dikelola oleh Israel, dan semua orang-orang dari semua agama telah dijamin dapat mengakses tepat-tempat suci sepenuhnya di dalam kota itu. tahun 1992, Senat AS dan Dewan Perwakilan Rakyat AS (*House of*

Representative) mengadopsi Resolusi Bersama Senat 113 (*Senate Current Resolution 113*) dari Seratus Kongres Kedua (*One Hundred Second Congress*) untuk memperingati 25 tahun penyatuan kembali erusalem dan menegaskan kembali sentiment kongres bahwa Yerusalem harus tetap menjadi kota yang tak terbagi. Pada 13 Spetember 1993, terdapat Deklarasi Prinsip tentang Pengaturan Swadaya Pemerintah Sementara (*Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements*) yang menjabarkan jadwal untuk penyelesaian masalah 'status akhir', termasuk Yerusalem.

Perjanjian Jalur Gaza dan Yerikho Area yang telah ditandatangani 4 Mei 1994 memulai transisi 5 tahun peeriode yang tercantum dalam Deklarasi Prinsip (*Declaration of Principles*). Pada bulan Maret 1995, 93 anggota Senat AS menandatangani surat kepada Sekretaris Negara saat itu, Warren Christopher, yang menganjurkan perencanaan untuk merelokasi Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel ke Yerusalem. Hal tersebut juga dilakukan pada tahun 1993, ditandatangani oleh 257 anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS yang menerangkan untuk pemindahan kedutaan tersebut selambat-lambatnya di tahun 1999. Amerika akan mempertahankan kedutaannya di Negara sekutu lainnya kecuali Israel. AS juga elakukan pertemuan resmi lainnya di kota Yerusalem sebagai bentuk pengakuan *de facto* atas ibukota Israel. Tahun 1996 menjadi peringatan bagi Israel atas hari ke 3000 tahun eksistensi Yahudi di Yerusalem sejak King David berkuasa.

Pemerintah AS juga harus menyediakan laporan implementasi. Dalam undang-undang menerangkan jika laporan tersebut diberikan selambat-lambatnya 30 hari setelah pemberlakuan undang-undang ini. Sekretaris Negara harus memberikan laporan tersebut kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Komite Hubungan Luar Negeri Senat. Laporan tersebut mencakup perkiraan tanggal penyelesaian fase pendirian Kedutaan Besar AS (termasuk situs identifikasi, arsitektur, kinstruksi, dll) dan perkiraan dana yang diperlukan.

Saat 6 bulan sesudah pengajual tahun fiscal Presiden, Sekretaris Negara harus melapor pada Ketua DPR dan Komite Hubungan Luar Negeri Senat akan progress yang dicapai dalam pembukaan kedutaan besar tersebut. Dalam undang-undang juga dijelaskan jika Presiden dapat enunda pemindahan tiap 6 bulan, dimuali pada 1 Oktober 1998. Penundaan tersebut harus dilaporkan pada kongres dengan alasan kepentingan keamanan nasional AS. Presiden juga dapat melakukan penundaan kembali setelah enam bulan tiap akhir periode, dengan catatan Presiden merangkan dampak dan memberi diskusi tentang bagaiman penunndaan tersebut memengaruhi kepentingan.

Menurut kutipan Sekretaris Negara AS Rex Tillerson, pemerintahan Israel, Pengadilan, Kantor Perdana Menteri terletak di Yerusalem. Hal tersebut jadi pengakuan atas realita yang telah ada. Presiden hanya melaksanakan kehendak dari rakyat Amerika (Tillerson, 2017). Setiap 6 bulan selama lebih dari dua dekade, Presiden Amerika Serikat harus memutuskan kembali apakah harus memindahkan Kedutaan Besar AS untuk Yerusalem atau tidak. Sejak kepemimpinan Presiden Clinton, Kedutaan Besar tersebut tetap berada di Tel Aviv karena menghindari pembahasan perdamaian Timur Tengah (Waxman, 2017). Saat Presiden Trump menandatangani dokumen penundaan pada bulan Juni, beliau menginfokan pada Presiden Otorita Palestina Mahmoud Abbas bahwa dirinya akan mengakui kota suci tersebut sebagai ibu kota Israel dan memulai proses pemindahan kedutaan disana.

Dalam perang enam hari tahun 1967, Israel berhasil merebut kawasan Yerusalem Timur lalu mendeklarasikan wilayah itu sebagai kawasannya. Tapi aneksasi itu tidak mendapat pengakuan internasional. Masyarakat internasional mayoritasnya mengatakan bahwa status final Yerusalem harus diselesaikan melalui negosiasi. Saat ini, tidak ada satu negarapun yang membuka Kedutaan Besar di Yerusalem, kecuali Yunani, Inggris dan AS yang membuka kantor konsulat. Yerusalem memiliki makna simbolis penting bagi

umat Yahudi, Kristen dan Islam, khususnya di kompleks puncak bukit yang menjadi tempat suci umat Yahudi dan Muslim yaitu Bukit Zaitun. Kompleks tersebut juga dianggap sebagai situs tersuci dalam ajaran Yudaisme. Di tempat itu juga terdapat Masjid Al Aqsa yang berperan sebagai tempat suci ketiga terpenting bagi umat Islam setelah Mekkah dan Madinah, serta Kubah Shakhrah (*Dome of the Rock*).

Kantor dan kediaman resmi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berada di Yerusalem. Beberapa parlemen Israel berkedudukan di Yerusalem, termasuk juga Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri. Kebanyakan para pemimpin dunia yang berkunjung ke Israel selalu melakukan lawatan ke Yerusalem untuk bertemu dengan para pejabat tinggi Israel. Bagi penduduknya, Yerusalem adalah kota terbuka, dimana warga Yahudi dan Palestina dapat bergerak dengan bebas. Walaupun kenyataannya interaksi antara kedua pihak sangat minim dan ada perbedaan besar antara lingkungan Yahudi yang kaya dan warga Palestina yang miskin. Namun deklarasi pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem akan punya makna simbolis yang mendalam dan dinilai makin menyulitkan proses perdamaian Israel-Palestina (Deutsche Welle, 2017).

2. Ambisi Presiden Donald Trump

Pada 6 Desember 2017, Presiden Trump mengumumkan bahwa AS mengakui bahwa Yerusalem merupakan ibukota dari negara Israel. Presiden Trump juga memerintahkan Departemen Luar Negeri AS untuk mempersiapkan perpindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Presiden mengambil tindakan dari *Jerusalem Embassy Act*. Menurut kutipan Sekretaris Negara AS Rex Tillerson, pemerintahan Israel, Pengadilan, Kantor Perdana Menteri terletak di Yerusalem. Hal tersebut jadi pengakuan atas realita yang telah ada. Presiden hanya melaksanakan kehendak dari rakyat Amerika (Tillerson, 2017). Presiden Trump juga menambahkan bahwa keputusan ini tidak

dimaksudkan untuk mencerminkan kebiasaan komitmen untuk memfasilitasi perjanjian perdamaian abadi. Amerika menginginkan perjanjian yang baik untuk Israel maupun Palestina. AS tidak mengambil posisi pada batas-batas khusus kedaulatan Israel di Yerusalem atau resolusi perbatasan yang direbutkan. Presiden Trump pun meminta semua pihak untuk mempertahankan status quo di situs-situs suci Yerusalem, termasuk Temple Mount atau yang dikenal sebagai Haram al-Sharif. Kala itu Kementerian Luar Negeri AS telah memulai proses untuk menerima arsitek dan para ahli teknik perencanaan untuk pembangunan kantor Kedutaan Besar AS di Yerusalem. Dibutuhkan waktu setidaknya tiga atau empat tahun untuk konstruksi gedung Kedutaan.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh seorang wartawan CNN yaitu Barbara Plett Usher di Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bahwa tidak ada strategi khusus di balik keputusan ini. "Fakta bahwa Palestina, dan seperti dilaporkan, para pemimpin dunia Arab, dikejutkan oleh keputusan ini merupakan satu tanda bahwa ini bukan merupakan bagian dari strategi Timur Tengah yang lebih luas," menurut Usher. Terdapat spekulasi bahwa Trump berupaya untuk mengubah beberapa hal sebagai taktik persiapan di lapangan untuk perundingan damai, namun ada lebih banyak bukti yang menunjukkan bahwa Trump hanya berfokus untuk pemenuhan janji kampanye terhadap Yahudi Amerika pro-Israel dan kelompok Kristen Evangelis yang merupakan basis massa politisnya. Dikutip dari BBC, Trump merasa frustrasi dengan penentangan yang terus-menerus dari tim keamanan nasionalnya. Pada 4 Desember 2017 tim keamanannya berkumpul untuk membahas opsi pengabaian kedutaan besar yang muncul setiap enam bulan atas alasan keamanan.

Menurut pernyataan President Trump, dirinya menandatangani dokumen penudaan pada tanggal 1 Juni 2017 tersebut dengan tujuan untuk kepentingan negosiasi perdamaian antara Palestina-Israel. Namun dirinya berulang

kali akan tetap memindahkan kedutaan tersebut, hanya menunggu waktu yang tepat saja (The White House, 2017). Presiden Trump dalam pidatonya pada tanggal 6 Januari 2017 menerangkan jika Lebih dari 20 tahun lamanya, presiden-presiden AS sebelumnya telah menjalankan “pengabaian” hukum, yang memungkinkan AS menunda pemindahan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Presiden Trump menjelaskan jika presiden mengeluarkan keringanan ini dengan keyakinan bahwa menunda pengakuan Yerusalem akan memajukan tujuan perdamaian. Sedangkan baginya para presiden tersebut membuat penilaian itu berdasarkan fakta yang mereka pahami kala itu. Setelah lebih dari 20 tahun pengabaian, Presiden Trump juga menjelaskan jika Amerika belum mencapai keputusan untuk perjanjian perdamaian abadi antara Israel dengan Palestina.

Dalam keterangan press Gedung Putih, Presiden Trump mengakui bahwa Yerusalem berperan sebagai ibukota dari Israel. Presiden Trump memenuhi janjinya dengan mengakui ibukota Israel yaitu Yerusalem dan membuka Kedutaan Besar AS disana. Pada 6 Desember 2017, Presiden Trump memberikan keterangan bahwa Amerika Serikat akan mulai menaiki Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan secara resmi membuka kedutaan Besar AS di Yerusalem. Kongres juga memberikan desakan kepada Presiden untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel berdasarkan Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem (Jerusalem Embassy Act) 1995 yang bersifat bipartisan – seruan suara bulat yang ditegaskan kembali pada senat tahun 2017 yaitu H.R.257 — 115th Congress (2017-2018), *Recognition of Jerusalem as the Capital of the State of Israel Act*. Setelah 22 tahun undang-undang tersebut diterbitkan, bagi Trump ini adalah saatnya AS mengakui Yerusalem sebagai ibukota dari Israel. Pengakuan tersebut sebagai bentuk kepentingan terbaik AS dan pengejaran perdamaian antara Israel dengan Palestina. Tujuh puluh tahun lalu, AS dibawah kepemimpinan Presiden Truman mengakui Negara Israel. Sejak saat itu, Israel menyebut ibukotanya Yerusalem – ibukota yang didirikan orang-orang

yahudi pada zaman kuno. Yerusalem merupakan kota pusat pemerintahan Israel, termasuk pejabat AS didalamnya, sekaligus tempat jika presiden bertamu. Menurut Trump dari keterangan tersebut ia pantas menyebut Yerusalem sebagai ibukota dari Israel. Dalam deklarasi yang dinyatakan Trump, ia mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibukota dan memngumumkan relokasi kedutaan AS, namun buka sebagai cerminan AS dalam memfasilitasi perjanjian perdamaian antara Israel dengan Palestina. Pemerintahan Trump menegaskan kembali komitmen yang sudah lama untuk membangun masa depan perdamaian dan keamanan Timur Tengah (The White House, 2017). Dalam keterangan press tersebut menyatakan jika dalam beberapa decade ini Presiden-presiden sebelumnya berkomitmen untuk memindahkan Kedutaan tersebut diingkari, kini sudah terwujud sebagai bentuk dukungan Negara sekutu terkuat AS tersebut. Menurutnya penundaan tersebut tidak membawa AS lebih dekat untuk perjanjian perdamaian abadi antara Israel dengan Palestina. Ini adalah sebagai bentuk bukti Presiden Trump dalam menepati janji kampanyenya pada warga Amerika Serikat (The White House, 2018).

Dalam keterangan press tersebut menjelaskan, 14 Mei 2018 AS resmi membuka Kedutaan besar di Yerusalem, tepat pada hari jadi Israel ke 70, juga bertepatan saat Presden Truman mengakui Israel sebagai Negara merdeka, dan menjadikan AS sebagai Negara pertama yang mengakui hal tersebut. Bagi Trump, pengakuan tersebut senagai bentuk penciptaan perdamaian antara Israel dengan Palestina dan sesuai dengan kenyataan. AS juga mengakui jika selama 70 tahun ini mereka lalai untuk memperpanjang kesopanan kepada Israe. Yerusaelm adalh pusat oemerintahan modern. Pemerintahan Trump menila jika pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota merupakan langkah yang baik untuk perdamaian antara Israel dan Palestina. Pengakuan tersebut bukan mengartikan AS memutuskan status akhir dari perdamaian tersebut. Setelah mengumumkan pengakuan ibu kota tersebut, Presiden Trump dengan cepat dan efisien

membuka Kedutaan Besar di Israel dengan biaya rendah untuk membayar pajak. Kedutaan tersebut dibangun dalam waktu enam bulan dengan biaya \$ 400.000 dengan bantuan staf diplomatic AS untuk memastikan jika Kedutaan Besar siap dibuka pada 14 Mei 2018. Pemerintahan Trump telah memperbaharui semua peta Pemerintahan Federal untuk mencerminkan status Yerusalem sebagai ibukota Israel dibawah kebijakan Amerika. Dalam rangka merayakan pembukaan tersebut, Pemerintahan Trump mengirim delegasi tingkat tinggi yang dipimpin Wakil Sekretaris Negara John Sullivan dan termasuk Sekretaris Pembendaharaan Steven Mnuchin, Penasihat Senior Jared Kushner, Penasihat Senior Ivanka Trump, dan Perwakilan Khusus untuk Negosiasi Internasional Jason Greenblatt (The White House, 2018).

Wakil Presiden AS Mike Pence dalam pidatonya di Konferensi Kebijakan AIPAC 2018 di Washington Convention Center pukul 18.35 waktu setempat mengatakan bahwa Presiden Trump berkomitmen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina. AS tidak mengambil posisi apapun dalam status quo kota suci Yerusalem baik dari putusan akhir, batasan spesifik atau resolusi untuk perbatasan yang diperebutkan. Jika kedua Negara menyatakan persetujuan, AS akan mendukung solusi dua Negara. Mike Pence juga menambahkan jika AS tidak akan pernah kompromikan keselamatan dan keamanan Negara Israel (The White House, 2018).

3. Desakan dari Kongres Amerika Serikat

Pada tahun 2017 Kongres Amerika Serikat mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) H.R.257 – *Recognition of Jerusalem as the Capital of the State of Israel Act*, 115th Congress (2017-2018). RUU ini disponsori oleh Representatif Trent Franks dari pantai Republikan. Bill ini dikeluarkan dalam Komite Luar Negeri. Dalam keterangannya dijelaskan RUU ini sudah diperkenalkan pada 1 April 2017 yang menjelaskan tentang kebijakan AS untuk mengakui

Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi (US Congress, 2017).

RUU ini mengungkapkan bahwa kongres:

1. AS harus mengakui status kedaulatan Yerusalem yang tidak terbagi sebagai ibukota Israel,
2. Mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem dari Tel Aviv sebagai pertanda komitmen pemerintahan AS untuk Israel,
3. Presiden dan Departemen Luar Negeri harus meegakkan kebijakan AS bahwa Yerusalem harus tetap menjadi ibukota yang tak terbagi,
4. Presiden harus menerapkan ketentuan-ketentuan undang-undang Kedutaan Besar Yerusalem tahun 1995 (Jerusalem Embassy Act of 1995) dan memulai proses memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, dan
5. Pejabat AS harus menahan diri dari tindakan yang bertentangan dengan hukum AS tentang hal ini.

RUU ini juga menjelaskan bahwa dokumen resmi pemerintahan AS apapun yang mencantumkan Negara dan ibukota mereka harus mengidentifikasi Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Presiden akan merelokasi Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem pada tanggal 1 Januari 2019. Undang-undang Kedutaan Besar Yerusalem tahun 1995 diamandemen untuk menghilangkan wewenang presiden, efektif 1 Januari 2018, untuk mengesampingkan batasan dana tertentu untuk akuisisi dan pemeliharaan gedung Departemen Luar Negeri di luar negeri sampai Kedutaan Besar AS di Yerusalem resmi dibuka.

Dijelaskan lebih lanjut, RUU ini menerangkan kembali pada awal Israel berdiri 14 Mei tahun 1948 setelah Perang Dunia II sebagai tanah perlindungan umat Yahudi. Pada tanggal 31 Juli 1988, Jordan melepaskan klaim kedaulatannya yang disengketakan ke Yudea dan Samaria, dan Yerusalem

Timur, dan oleh karena itu klaim berdaulat untuk daerah-daerah ini tetap “diperdebatkan”, bukan “diududki”. Selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal berlakunya Undang-undang ini, Sekretaris Negara harus menyerahkan kepada kongres laporan yang merincikan rencana departemen luar negeri untuk menerapkan UU ini termasuk perkiraan tanggal penyelesaian (identifikasi situs, pembebasan lahan, survey arsitektur, teknik, dan konstruksi, persiapan lokasi), dan perkiraan dana yang diperlukan untuk mengimplementasikan UU ini, termasuk biaya yang berkaitan dengan pendirian Kedutaan Besar AS di Yerusalem. RUU ini disponsori oleh 36 anggota kongres.

Senat AS juga mengajukan RUU S.11 - *Jerusalem Embassy and Recognition Act*, disponsor oleh Senator Dean Heller pada 3 Januari 2017 terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel baik secara de facto maupun de jure dan pemindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel ke Yerusalem. RUU ini menjelaskan jika:

1. Presiden dan Sekretaris Negara secara terbuka menegaskan kebijakan AS bahwa Yerusalem adalah kota yang tidak terbagi;
2. Presiden harus segera mengimplementasikan ketentuan-ketentuan UU Kedutaan Besar Yerusalem tahun 1995 dan memulai proses relokasi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel ke Yerusalem;
3. Pejabat AS harus menghindari segala tindakan yang bertentangan dengan hukum AS tentang hal ini; dan
4. Dokumen resmi apapun dari Pemerintah AS yang mencantumkan Negara dan ibu kotanya harus mengidentifikasi Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

UU Kedutaan Besar Yerusalem juga dimandemen dimana bagian 7 dihilangkan dan bagian 8 diganti menjadi bagian 7 (US Congress, 2017). Kongres juga mengeluarkan RUU

H.R.4718 - *Recognition of Jerusalem as the Capital of the State of Israel Act*, disponsor oleh Ron DeSantis pada 21 Desember 2017 terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel jika relokasi Kedutaan tersebut harus dilakukan tidak lebih dari 1 Januari 2019.

B. Faktor Penghambat Berlangsungnya Kebijakan Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel ke Yerusalem

Berdasarkan isi dari Undang-undang Kedutaan Besar Yerusalem, perintah untuk merelokasi kedutaan tersebut dibilang selambat-lambatnya pada tahun 1999. Apabila Presiden-presiden yang memimpin pada masa tersebut belum bisa memindahkan kedutaan, maka harus menandatangani dokumen penundaan tiap enam bulan sekali apabila memang belum bersedia untuk memindahkan kedutaan besar tersebut. Hal tersebut berlangsung dimulai tahun 1999 hingga tahun 2017, pada era pemerintahan Presiden Clinton hingga Presiden Trump. Presiden-presiden sebelumnya beranggapan bahwa kebijakan ini dinilai bertentangan dengan kebijakan yang sudah ada selama puluhan tahun yang lalu. Hal ini juga dikemukakan karena dapat memperburuk hubungan dengan sekutu Arab dan telah mempersulit upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali perundingan perdamaian antara Israel-Palestina yang lama terhenti (Marniati K. D., 2018). Presiden Trump dan Perdana Menteri Israel Netanyahu menganggap Iran masih merupakan musuh dari AS dengan Israel. Perwakilan AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan saat berpidato di Konferensi Tahunan AIPAC 2018 bahwa akan terus membela Israel di PBB. Menurutnya PBB sudah lama bersikap diskriminatif terhadap Israel dan merusak perdamaian dengan mendorong Israel akan segera pergi.

Presiden Donald Trump melakukan penundaan pada 1 Juni 2017 karena ingin merundingkan terlebih dahulu kesepakatan antara Israel dan Palestina, demi keamanan nasional Amerika Serikat (The White House, 2017). Dalam

keterangan press dari gedung Putih menyatakan jika Trump tidak akan mengingkari janjinya, hanya saja menunggu waktu yang tepat untuk mewujudkannya. Friedman, yang bekerja sebagai pengacara untuk Trump, mendorong agar pemindahan kedutaan dilakukan tahun ini, dan penasihat senior Trump, Jared Kushner, yang menjadi mediator perdamaian Timur Tengah juga mendukungnya. Tapi Tillerson mengajukan petisi kepada Trump dalam sebuah pertemuan pada Kamis. Ia meminta lebih banyak waktu untuk meningkatkan keamanan gedung, dan Presiden menyetujuinya. "Apa yang akan Anda lihat dari Menlu adalah bahwa kita akan melakukan ini dengan kecepatan keamanan, bukan pada laju politik," kata Pejabat Kemenlu untuk diplomasi dan urusan publik, Steven Goldstein.

Pada 1 Juni 2017, Presiden Trump memberikan memorandum kepada Sekretaris Negara No. 2017-07 dengan subjek melakukan Penangguhan Batasan di bawah Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem berisikan penangguhan selama 6 bulan batasan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dengan alasan keamanan nasional AS dan menyerukan Sekretaris Negara untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan UU Kedutaan Besar Yerusalem ke Daftar Federal (The White House, 2017). Hal ini juga dilakukan Presiden Trump pada tanggal 4 Juni 2018 sebagai laporan rutin kepada kongres (The White House, 2018).